



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AWALIA NOOR BAROROH**
2. Jabatan : **VICE PRESIDENT**
3. NHK : **794550**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.037.640.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 555 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 137.640.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 277.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 G CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, NISSAN EVALIA MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 135.400.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 737.913.300

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 673.855.058

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.861.808.358



III. HUTANG

Rp. 400.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.461.808.358

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.